



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DJOKO LUKITO
2. Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 160568

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.750.363.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1994 m2/182 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, WARISAN Rp. 185.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 575 m2/160 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Bangunan Seluas 90 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 4720 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
5. Tanah Seluas 2696 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1080 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 102.063.000
7. Tanah Seluas 1069 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 45.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 378.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **127.500.000**

1. MOTOR, KAWASAKI BLITZ Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000



2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2020, HADIAH Rp. 15.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 EMT CKD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	90.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	843.441.857
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.811.304.857
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.811.304.857

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.